



Kerangka Kerja Untuk Menganalisis Praktik Akuntan Publik Sebagai Institusi Sosial

Rommel Togatorop¹, Rimi Gusliana Mais²

¹Institut Bisnis Indonesia Kwik Kian Gie, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia

E-mail: 0392202003@student.kwikkiangie.ac.id¹, rimi_gusliana@stei.ac.id²

Abstract: *Accountant is regarded as one of the highly significant fields of discipline in contemporary societies. In recognizing its contributions to the larger society, this paper developed a framework to determine if public accountancy practice has become an institution, being a sector of society. In the sociological perspective, accounting can be aligned with other social institutions as it is perceived to make significant contributions to the long-term well-being of society. At the conceptual level, accounting still generates changes and debates among accounting experts and researchers. The emerging and prevailing accounting practices sometimes lead to diverse interpretations. The paper concludes that the state of condition, roles, and contributions of the public accountancy firms be documented through a scientific research that could be a source of knowledge and a basis for innovation in the profession and organizational growth of the individual auditing firms. Results can also be used in setting technical standards and regulatory pronouncements.*

Keywords: *Accounting, Public Accounting Practice, social institutions, descriptive design, Indonesia*

Abstrak: Akuntan dianggap sebagai salah satu bidang disiplin yang sangat penting dalam masyarakat kontemporer. Dalam mengakui kontribusinya terhadap masyarakat yang lebih luas, makalah ini mengembangkan kerangka kerja untuk menentukan apakah praktik akuntan publik telah menjadi sebuah institusi, menjadi sebuah sektor dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, akuntansi dapat disejajarkan dengan institusi sosial lainnya karena dianggap memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Akuntansi dalam tataran konsep, masih memunculkan perubahan dan perdebatan diantara para ahli dan para peneliti akuntansi, praktek akuntansi yang muncul dan berlaku terkadang memunculkan beragam penafsiran. Makalah ini menyimpulkan bahwa keadaan kondisi, peran, dan kontribusi kantor akuntan publik didokumentasikan melalui penelitian ilmiah yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan dasar inovasi dalam pertumbuhan profesi dan organisasi masing-masing perusahaan audit. Hal ini juga dapat digunakan dalam menetapkan standar teknis dan pernyataan peraturan.

Kata Kunci: Akuntansi, Praktik Akuntan Publik, institusi sosial, desain deskriptif, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Akuntan telah dipopulerkan sebagai bahasa bisnis. Ini adalah sarana yang digunakan individu dan organisasi untuk mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan mereka sejumlah besar informasi keuangan tentang operasi bisnis mereka.

Akuntansi modern ini makin dipandang penting dan berpengaruh setelah berakhirnya perang dunia serta akan makin berkembang di masa mendatang. Meskipun demikian, akuntansi modern ini adalah institusi yang tidak terlalu banyak diketahui, khususnya dari perspektif sosiologi. Makna dari institusi yang digunakan di sini sama luasnya dengan makna yang digunakan untuk komponen-komponen sosial budaya yang utama, yaitu institusi sosial. Dengan demikian, akuntansi dipandang sama dengan institusi-institusi sosial utama lainnya seperti: keluarga, agama, pekerjaan, pendidikan, seni dan sastra, serta ilmu dan teknologi

yang semuanya itu telah dipelajari secara luas oleh para sosiolog. Benar atau salah, akuntansi dipandang sebagai sesuatu yang dikembangkan dan disebarluaskan lebih lanjut karena dianggap memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang (Rini, 2022).

Akuntan diyakini sebagai salah satu dari banyak praktik yang sangat penting dalam masyarakat kontemporer. Ini memberikan serangkaian teknik untuk mengatur dan memantau kegiatan, dan bahasa yang digunakan untuk menentukan dan menggambarkan tujuan, prosedur, dan kebijakan organisasi. Namun, para peneliti saat ini terdorong untuk melihat lebih jauh dari sekedar akuntansi dalam organisasi untuk melihat bagaimana hal ini terkait dengan perubahan dalam lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian di bidang akuntansi sedang melihat bagaimana akuntansi telah menjadi bagian dari perangkat budaya Masyarakat (Chapman et al., 2009; Sanada, 2021).

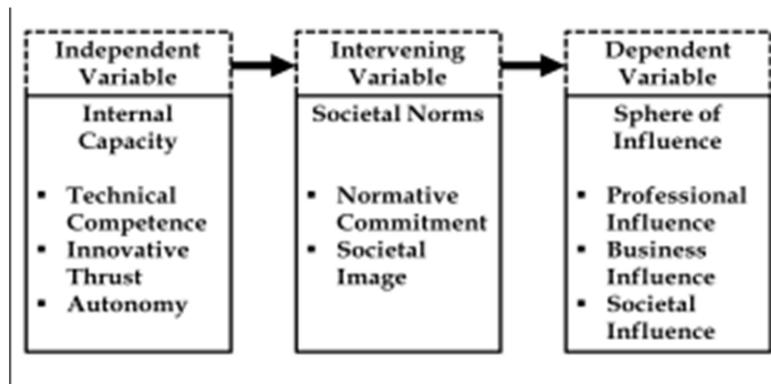
Biasanya, istilah “akuntan” digunakan secara bergantian dengan “akuntansi”. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan akuntan sebagai “profesi atau bisnis seorang akuntan.” Dengan demikian, akuntansi sebagai sebuah konsep luas mencakup akuntansi. Mengacu pada disiplin atau cabang studi yang berhubungan dengan tugas seorang akuntan; salah satunya adalah akuntansi (Mendoza, 2012; Richard Edwards & Walker, 2020). Profesi akuntansi Indonesia memiliki empat bidang praktik: akuntan publik, perdagangan dan industri, pemerintahan, dan pendidikan akuntansi. Dari bidang-bidang ini, akuntan publik menjadi terkenal selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Faktanya, gelar profesional “Akuntan Publik Bersertifikat” (CPA) diciptakan terutama bagi mereka yang berniat memberikan jasa di bidang ini..

2. KERANGKA

Tulisan ini melihat praktik akuntan publik dari perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai sektor masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kantor akuntan publik, yang lebih dikenal sebagai kantor audit eksternal, dan tingkat kontribusinya terhadap masyarakat luas. Hasil survei akan memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan apakah praktik akuntan publik telah mencapai tingkat “institusionalitas” sehingga dapat dianggap sebagai “lembaga sosial”.

Tiga set atribut dengan total delapan indikator mencirikan praktik akuntan publik dengan indikator dan fungsi kantor akuntan publik (Gambar 1).

Rangkaian atribut pertama berkaitan dengan kapasitas internal kantor akuntan publik yang diukur dalam hal kompetensi teknis, dorongan inovatif, dan otonomi. Rangkaian ini tidak hanya mencakup indikator-indikator yang melampaui operasi sehari-hari dan tugas-tugas sepele dari sebuah perusahaan audit, namun lebih banyak lagi indikator-indikator yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk inovasi, pertumbuhan, dan daya saing. Kapasitas internal perusahaan membentuk norma-norma yang mereka pancarkan ke masyarakat luas. Dalam melakukan penelitian, kumpulan atribut ini merupakan variabel independen.



Gambar 1. Kerangka operasional dalam menganalisis praktik akuntan publik sebagai institusi sosial

Kelompok kedua mencakup peningkatan norma-norma normatif dan diukur berdasarkan komitmen normatif dan citra masyarakat. Rangkaian ini berkaitan dengan bagaimana kantor akuntan publik mendorong praktik yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai positif di antara individu, kelompok, dan organisasi. Sebagai variabel intervening, norma masyarakat dibentuk oleh kapasitas internal kantor akuntan publik. Namun, norma-norma sosial ini menentukan lingkup pengaruh di luar operasi bisnis mereka dan dalam masyarakat yang lebih luas.

Kelompok ketiga mengacu pada lingkup pengaruh perusahaan dalam profesi akuntansi, komunitas bisnis, dan masyarakat luas. Hal ini merupakan ujian akhir bagi kantor akuntan publik sebagai institusi sosial. Dalam melakukan penelitian, ini adalah variabel dependen, yang terutama berkaitan dengan norma-norma sosial perusahaan.

Kompetensi Teknis.

Hal ini mengacu pada kemampuan perusahaan audit eksternal untuk melakukan layanan profesional seperti yang diharapkan oleh klien dan diamanatkan oleh otoritas pengatur. Hal ini akan diukur dengan melihat apakah perusahaan audit:

- a) mempunyai keahlian penting untuk melaksanakan jasa akuntan publik;
- b) memelihara teknologi yang memadai dan penting bagi praktik profesional akuntan publik; Integrasi mendalam dari teknologi yang muncul seperti big data, ML dan AI di bidang akuntansi telah memperkenalkan perubahan luar biasa pada profesi akuntansi, seperti merekayasa ulang prosedur akuntansi, mengurangi kesalahan dan distorsi informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi akuntansi, dan mempromosikan transformasi struktur karir akuntansi (Alghafiqi & Munajat, 2022).
- c) memperoleh sarana dan prasarana fisik yang memadai untuk penyampaian layanan yang efektif;
- d) memperbarui fitur layanan profesional dengan kebutuhan pasar;
- e) menghasilkan kualitas jasa profesional yang dapat diterima;
- f) memberikan jasa profesional dengan harga pantas;
- g) memenuhi harapan pemegang saham klien;
- h) memenuhi persyaratan badan pengatur pemerintah; dan
- i) mempersiapkan tuntutan masa depan klien di bidang akuntansi.

Dorongan Inovatif.

Atribut ini mencakup upaya kreatif yang didukung oleh perusahaan audit eksternal dan upaya untuk memajukan sistem canggih atau cara modern dalam melakukan sesuatu. Hal ini akan menilai apakah perusahaan audit:

- a) meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas;
- b) mempromosikan penggunaan teknologi atau metode baru kepada kliennya;
- c) menyimpang dari prosedur dan praktik yang sudah ketinggalan zaman;
- d) melakukan proyek atau kegiatan penelitian;
- e) mendiseminasikan hasil atau keluaran penelitian;
- f) menyebarkan informasi terkini melalui buletin, situs web, dll.;
- g) menerbitkan jurnal teknis atau profesional; dan
- h) mendukung proyek-proyek inovatif dari entitas lain.

Otonomi.

Hal ini mengacu pada tingkat independensi yang dimiliki atau dinikmati oleh perusahaan audit dalam menjalankan berbagai urusan operasi bisnisnya. Perusahaan audit akan dinilai apakah perusahaan tersebut:

- a) mempunyai sumber daya keuangan yang mencukupi atau tidak;
- b) menentukan arah organisasinya sendiri;
- c) mempunyai kebijakan, aturan dan prosedur yang jelas;
- d) mengambil keputusan berdasarkan analisis atau proses sendiri;
- e) menjalankan urusan atau kegiatan usahanya sendiri dengan bebas;
- f) mempunyai solusi sendiri terhadap permasalahan bisnis sehari-hari; dan
- g) mengandalkan sumber daya atau kapasitasnya sendiri dalam melakukan penugasan.

Komitmen Normatif.

Atribut ini mengacu pada sejauh mana perusahaan audit eksternal menunjukkan rasa komitmennya dalam mempromosikan nilai-nilai positif, menetapkan pola perilaku yang dapat diterima, atau mengembangkan norma perilaku. Untuk menentukan tingkat kelembagaan suatu perusahaan audit akan dievaluasi apakah:

- a) memerlukan standar etika yang tinggi di kalangan stafnya;
- b) mematuhi standar yang disyaratkan oleh berbagai organisasi profesi di bidang akuntansi;
- c) mengambil kebijakan mengenai benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas resmi pegawai;
- d) mengambil sikap terhadap isu-isu yang mendorong praktik bisnis yang dapat diterima;
- e) meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban sosial;
- f) menekankan nilai pekerjaan dan martabat pekerja;
- g) menganut prinsip tata kelola yang baik; dan
- h) menerima akuntabilitas atas tindakannya sehubungan dengan penyediaan layanan.

Citra Masyarakat.

Aspek ini mengacu pada sejauh mana auditor eksternal menciptakan citra khas sebagai media atau kendaraan penting untuk kemajuan atau perbaikan masyarakat. Hal ini akan menentukan apakah perusahaan audit:

- a) mempertahankan citra publik yang positif sebagai penyedia jasa profesional;
- b) menumbuhkan merek yang disukai untuk layanan atau produknya;
- c) menciptakan ciri-ciri jasa yang berbeda dari yang dihasilkan oleh perusahaan atau entitas lain;
- d) mempertahankan tingkat ingatan tertentu dalam masyarakat;
- e) memperjuangkan praktik terbaik dalam komunitas bisnis; dan

- f) mendukung tujuan-tujuan sosial atau reformasi kemasyarakatan.

Pengaruh Profesional.

Atribut ini mengacu pada kemampuan perusahaan audit eksternal untuk merangsang pengembangan profesi dan mempengaruhi kemajuan karir dan kondisi kehidupan anggota profesi akuntansi lainnya. Hal ini menjawab pertanyaan apakah perusahaan audit:

- a) menciptakan kesempatan kerja bagi anggota profesi akuntansi;
- b) memberikan bimbingan yang berarti kepada para anggota profesi akuntansi mengenai hal-hal yang mempengaruhi praktik profesional;
- c) menyumbangkan pengetahuan atau wawasan untuk memperjelas permasalahan atau menjelaskan area abu-abu pada materi pelajaran profesional; memulai diskusi tentang agenda teknis dalam profesinya;
- d) mengambil peran kepemimpinan dalam menjalankan organisasi profesi di bidang akuntansi;
- e) mewakili profesi dalam urusan yang dilaksanakan oleh badan profesi lain atau dunia usaha;
- f) mewakili profesinya dalam acara atau kesempatan internasional;
- g) memberikan bantuan atau dukungan keuangan kepada organisasi profesi di bidang profesi akuntansi;
- h) memberikan bantuan atau dukungan sumber daya manusia kepada organisasi profesi di bidang profesi akuntansi; dan
- i) mewujudkan sifat-sifat positif yang dapat ditiru oleh Akuntan profesional lainnya.

Pengaruh Bisnis.

Atribut ini mengacu pada kemampuan perusahaan audit eksternal untuk mempengaruhi pengusaha dan badan usaha dalam cara mereka menjalankan bisnis dan untuk meningkatkan standar kinerja. Hal ini akan dievaluasi dalam hal apakah perusahaan audit:

- a) memberikan panduan yang bermakna kepada komunitas bisnis mengenai praktik bisnis;
- b) membentuk praktik bisnis di wilayah tersebut;
- c) menstimulasi lingkungan usaha yang berada dalam jangkauannya;
- d) mempengaruhi kecenderungan atau pola kegiatan usaha;

- e) memotivasi individu atau badan lain untuk terlibat dalam aktivitas dan fungsi perusahaan;
- f) meningkatkan kesadaran bersaing di kalangan dunia usaha; dan
- g) menjadi teladan bagi dunia usaha lainnya.

Pengaruh Masyarakat.

Hal ini juga dikenal sebagai dampak penyebaran aktivitas. Hal ini mengacu pada berbagai manfaat yang diberikan oleh perusahaan audit eksternal kepada komunitasnya, masyarakat atau masyarakat umum. Hal ini melihat apakah perusahaan audit:

- a) mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sifat akuntan publik;
- b) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit;
- c) menyediakan lapangan kerja yang layak bagi angkatan kerja;
- d) menawarkan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan sektor masyarakat yang mampu bekerja;
- e) memberikan pendapatan yang sesuai bagi pemerintah;
- f) menciptakan peluang percepatan kegiatan perekonomian;
- g) memberikan kontribusi terhadap pembangunan fisik masyarakat;
- h) terlibat dalam proyek-proyek sosio-ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian, kesehatan, pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan sejenisnya;
- i) meningkatkan kesadaran dan pengembangan budaya;
- j) hibah, beasiswa atau bentuk dukungan pendidikan lainnya kepada individu yang bukan merupakan karyawannya; dan
- k) memajukan perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekologi.

3. TUJUAN STUDI

Studi ini mengandaikan nilai menganalisis profesi akuntansi dari konteks sosiologis yang lebih luas. Ini berupaya untuk mengeksplorasi atribut institusi sosial dalam menganalisis praktik akuntansi publik.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

4. METODOLOGI

Analisis tinjauan literatur memberikan dasar dalam mempelajari institusionalisasi kantor akuntan publik. Instrumen tersebut menyediakan data literatur sebagai dasar yang selanjutnya dapat dilengkapi dengan survey, wawancara dan diskusi kelompok terfokus, namun pada penelitian ini tidak digunakan.

Praktik Akuntansi Publik

Akuntan publik memerlukan pelaksanaan penugasan dengan klien yang menghasilkan penerbitan laporan pengesahan yang sesuai dengan standar praktik profesional. Di antara penugasan yang dicakup oleh akuntan publik adalah audit eksternal, yang juga dikenal sebagai audit independen. Dalam jenis keterlibatan ini, tidak ada hubungan karyawan-majikan melainkan hubungan profesional-klien. Profesional dibayar berdasarkan biaya tergantung tentang sifat dan cakupan subjek perikatan. Praktik akuntansi publik kontemporer telah meluas ke jasa konsultasi dan jasa perpajakan. Praktik konsultasi telah berkembang menjadi bidang luas yang mencakup segala hal yang memerlukan dukungan profesional dari CPA.

Dalam akuntansi informasi akuntan akan digunakan untuk memberikan informasi kepada eksekutif, legislatif, eksekutor pengadilan, dan eksekutive publik tentang kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan. Standar dan Teori Akuntansi ini terkait erat dengan akuntansi keuangan, khususnya pelaporan informasi keuangan kepada pihak ketiga. Teori akuntansi ini menimbulkan pertanyaan apakah teori seperti itu ada. Menurut beberapa ilmuwan, di mana akuntansi berkembang dengan kecepatan yang lebih cepat, belum mengembangkan teori akuntan. Teori harus didukung oleh banyak penelitian yang berisi hipotesis yang kebenarannya diuji. Teori ini memiliki tiga karakteristik fundamental: (1) kemampuan untuk menjelaskan atau menjelaskan fakta ; (2) prediktabilitas; dan (3) generalisasi(Silalahi & Maullang, 2023).

Akuntansi publik adalah disiplin yang sangat terampil dan teknis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, praktik audit eksternal telah diatur oleh pemerintah. CPA yang melakukan audit eksternal memiliki standar keterampilan yang tinggi dalam mengeluarkan opini profesional. Penggunaan teori – teori sosial sebagai metode penelitian dalam penelitian akuntansi berkaitan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi dan antropologi yang mampu menjawab lingkup dan fenomena interaksi para pelaku akuntansi

tersebut (Shonhadji, 2021) . Mereka bertanggung jawab dan dapat dituntut atas segala bentuk malpraktik jika pelaksanaan tugasnya melanggar standar profesi.

Entitas mencari akuntan profesional untuk melakukan audit eksternal karena berbagai alasan yang lebih umum adalah untuk mematuhi persyaratan undang-undang. Di Indonesia, Komisi Sekuritas dan Bursa dan Biro Pendapatan Internal memberikan mandat kepada organisasi untuk menggunakan jasa auditor eksternal terutama untuk penyampaian laporan keuangan akhir tahun mereka. Dapat dimengerti bahwa audit eksternal meningkatkan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan organisasi-organisasi ini. Oleh karena itu, pengguna laporan mengembangkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap informasi apa pun yang ditampilkan dan menggunakannya untuk tujuan mereka masing-masing.

Praktik akuntan publik telah melambungkan kebangkitan firma audit terkemuka di Indonesia dan sebagian besar berkantor pusat di Metropolitan Jakarta, yang merupakan pusat bisnis dan perdagangan di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan ini telah bertindak sebagai auditor eksternal di sebagian besar badan usaha besar dan perusahaan multinasional di negara ini. Peran mereka dalam pertumbuhan sektor bisnis dan perekonomian tidak dapat diabaikan. Kontribusi mereka terhadap pengembangan individu profesional dalam hal pelatihan dan pekerjaan tidak dapat diukur. Keterlibatan dan pengaruh mereka dalam profesi akuntansi sudah nyata dan nyata.

Praktik akuntan publik juga merupakan habitat sejumlah perusahaan audit skala menengah dan kecil yang memberikan jasa profesional kepada eselon bawah baik di dunia usaha maupun organisasi non-pemerintah lainnya. Meskipun ukurannya sebagai suatu entitas relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, jumlah mereka sebagai suatu kelompok atau sektor lebih besar.

Bagaimana firma audit ini, baik besar, menengah atau kecil, berkontribusi kepada masyarakat merupakan topik kajian menarik yang perlu didokumentasikan. Tidak diragukan lagi, mereka telah bertahan dalam ujian zaman karena mereka tetap beroperasi selama beberapa dekade terakhir. Mereka juga memperoleh akses yang sangat besar terhadap operasional sebagian besar organisasi bisnis dan telah menembus basis pengetahuan sebagian besar entitas. Selain itu, mereka juga dipercaya untuk memberikan rekomendasi bermakna yang memengaruhi keputusan dan arah bisnis. Hal ini bermuara pada persoalan apakah sektor praktik publik telah menjadi sebuah institusi masyarakat.

Atribut institusi sosial

Institusi adalah sistem aturan sosial yang mapan dan lazim yang menyusun interaksi sosial. Misalnya, bahasa, uang, hukum, sistem bobot dan ukuran, tata cara makan, dan perusahaan serta organisasi lainnya semuanya merupakan institusi (Hodgson, 2013). Definisi tersebut didukung oleh (Harbi & Anderson, 2010) dengan menunjukkan bahwa institusi umumnya diterapkan pada adat istiadat dan pola perilaku yang penting bagi suatu masyarakat, serta pada organisasi formal tertentu di pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, institusi umumnya merupakan mekanisme terstruktur yang dapat memberikan ketertiban sosial dan kerja sama yang mengatur perilaku sekelompok individu.

Dalam bahasa sehari-hari, istilah “lembaga” dan “lembaga sosial” digunakan untuk merujuk pada berbagai bentuk sosial, termasuk konvensi, aturan, ritual, organisasi, dan sistem organisasi. Lembaga sosial yang di dalam aktivitasnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan berpartisipasi juga dalam produksi pelayanan sosial (Lewaherilla et al., 2022). Namun, (Sintonen et al., 2003) menggarisbawahi perlunya membedakan institusi sosial dari bentuk sosial yang tidak terlalu kompleks seperti konvensi, aturan, norma sosial, peran dan ritual. Yang terakhir ini merupakan salah satu elemen konstitutif dari institusi. Lebih lanjut, institusi sosial perlu dibedakan dari entitas sosial yang lebih kompleks dan lengkap, seperti masyarakat atau budaya, dimana institusi tertentu biasanya merupakan elemen konstitutifnya.

Fungsi umum lembaga-lembaga dalam masyarakat sangat luas. Secara umum, Lembaga-lembaga masyarakat tersebut melakukan aktivitas pelayanan bagi kesejahteraan suatu Masyarakat (Rauf & Yusri Munaf, 2015). Bentuk, struktur, dan prosedurnya bermacam-macam, namun semuanya mewujudkan satu fungsi umum yang penting bagi setiap masyarakat: pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Namun lebih dari itu, mereka juga mendefinisikan nilai-nilai sosial yang dominan, membentuk pola perilaku sosial yang permanen, dan memberikan peran bagi individu.

Institusi adalah bagian dari konstruksi sosial suatu komunitas, dan menentukan cara orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Hal ini ditentukan oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat tersebut, serta memberikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat (Harbi & Anderson, 2010). Oleh karena itu, tanpa institusi sosial, masyarakat dan budayanya akan mengalami kemerosotan total. Pemikiran ini didukung oleh keberadaan pranata sosial seperti keluarga, agama, pendidikan, pemerintahan, dan sistem perekonomian yang telah berlangsung selama ribuan tahun.

Institusi secara signifikan mempengaruhi banyak bidang kehidupan masyarakat. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa masyarakat menganggap dirinya tergabung dalam beberapa institusi. Namun, pengaruh sosial relatif dari institusi berbeda-beda antar masyarakat, dalam masyarakat, dan dari waktu ke waktu.

Singkatnya, suatu institusi mencakup ruang yang luas dan dicirikan dengan memiliki serangkaian elemen yang terus berinteraksi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini ditegaskan oleh (Davidson & Goldberg, 2010) yang mengutip definisi singkat mengenai institusi sebagai jaringan yang memobilisasi ketika mereka mengumpulkan, mengkoordinasikan, menyebarkan, menyeimbangkan, dan mengadili aliran sumber daya yang kompleks. Selain itu, mereka menjelaskan bahwa institusi juga merupakan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang mendorong terbentuknya budaya mereka sendiri.

Suatu institusi dibedakan dari bentuk afiliasi yang lebih longgar berdasarkan durasinya. Lembaga-lembaga diharapkan dapat memfungsikan dan menjalankan sistem dan mekanisme yang berkesinambungan dari waktu ke waktu, sering kali berupaya menyediakan arsip atau tempat penyimpanan proses dan sejarah kolektif mereka sendiri. Mereka mewujudkan protokol tata kelola dan berbagai tingkat pengaruh terhadap proses dan struktur masyarakat. Mereka memvalidasi dan menerapkan norma, praktik, dan keyakinan, berupaya memastikan pertukaran yang teratur melalui interaksi normatif.

Dalam masyarakat modern, sebagian besar kehidupan sehari-hari berlangsung dalam situasi institusional yang terspesialisasi. Ini termasuk tugas ekonomi pertukaran barang dan jasa yang dilakukan di toko, pabrik, kantor, dan ruang komersial lainnya. Tugas-tugas ekonomi tersebut menyebabkan munculnya badan-badan usaha yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa kepada sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan imbalan upah keuntungan yang adil.

Praktik profesional akuntan publik di Indonesia mempunyai asal muasal yang cukup panjang. Di Indonesia, akuntansi publik telah diatur dengan;

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Perusahaan Perbukuan.
- b) Tahun 1971, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 1971 tentang Pembentukan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah bagi para akuntan yang memiliki keahlian di bidang perbukuan dan akuntansi.
- c) Tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Akuntan Publik. Undang-undang ini menyelaraskan praktik akuntansi di Indonesia dengan standar internasional. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menciptakan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas mengawasi profesi akuntan publik.

- d) Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Akuntan Publik. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang lebih rinci terkait praktek akuntan publik di Indonesia.
- e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur tentang lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik dan KAP, hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP, kerja sama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA), Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Komite Profesi Akuntan Publik, pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 mengatur tentang Standar Profesional Akuntan Publik
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 mengatur tentang Pelaksanaan Pengawasan Akuntan Publik
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 mengatur tentang Penyelenggaraan Kegiatan Audit
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2021 mengatur tentang Pengawasan Profesi Akuntan Publik

Setelah puluhan tahun berdiri dan menonjol, patut dikaji apakah akuntan publik telah menjadi sebuah institusi. Tidak dapat dipungkiri, kantor akuntan publik merupakan entitas yang dinamis. Perusahaan kecil tumbuh menjadi perusahaan menengah dan besar, ada yang stagnan, ada yang stabil, dan ada yang hilang. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini, antara lain, bergantung pada kemampuan mereka untuk bertahan dan sejahtera. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan mereka institusi.

Indikator kelembagaan

Suatu lembaga dikatakan terbentuk apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Pertama, harus ada pengakuan bahwa pola perilaku, sistem norma, kelompok nilai, atau struktur organisasi tertentu bernilai dan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, proses pelebagaan mencakup cakupan kegiatan yang luas. Hal ini dikonfirmasi oleh

(Hunt et al., 1997) yang meyakini bahwa ketika aktivitas apa pun menjadi rutinitas dan kebiasaan, maka proses pelembagaan telah terjadi.

Kedua, kegiatan-kegiatan tertentu harus diakui sebagai kegiatan yang relatif signifikan oleh mereka yang tercakup dan terkena dampak pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan gagasan (Hess et al., 1996) yang percaya bahwa pelembagaan adalah proses dimana adaptasi tertentu menjadi pola atau cara hidup yang mapan yang mempengaruhi seluruh bidang aktivitas dari mereka yang terlibat. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan tersebut diterima secara luas dan relatif stabil karena mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut menyadari pentingnya kegiatan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan (Vander Zanden, 1996) yang menyatakan bahwa para sosiolog memandang institusi sebagai instrumen utama yang mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan tugas-tugas penting kehidupan.

Salah satu pertanyaan penting dalam mempelajari institusi sosial adalah “Kapan sebuah institusi benar-benar sebuah institusi?” Dengan kata lain, apa kriteria untuk mengetahui bahwa kegiatan tertentu telah dilembagakan?

Program Penelitian Antar Universitas dalam Pembangunan Institusi, sebuah program multidisiplin yang dilakukan oleh para sarjana dari Universitas Michigan, Universitas Syracuse, Universitas Indiana, dan Universitas Pittsburgh memperkenalkan konsep pembangunan institusi pada awal tahun enam puluhan. Program ini menyarankan tiga uji kelembagaan: (a) kemampuan untuk bertahan hidup, (b) pencapaian nilai intrinsik, dan (c) penyebaran dampak kegiatan.

Seperangkat kriteria yang lebih tua menekankan bahwa kompleksitas organisasi dapat menjadi indeks untuk mengukur kelembagaan, yaitu semakin kompleks suatu organisasi, maka akan semakin terlembagakan (Research Headquarters & Muioigan, n.d.). (Esman, 1975) menggunakan indikator kelembagaan sebagai berikut: a) kapasitas teknis, b) komitmen normatif, c) dorongan inovatif, d) citra lingkungan, dan e) dampak penyebaran. Namun, Hanson (1968) dan Blasé (1986) mengembangkan kriteria kelembagaan sebagai berikut: penggunaan keluaran dan layanan organisasi oleh publik, persetujuan lisan dari publik tersebut, kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi, dukungan dari organisasi lain, otonomi dan penyebaran. norma-norma inovatif kepada orang lain dalam lingkungan.

(Duncan, 1975) menyebutkan bahwa suatu organisasi dianggap terlembaga jika terdapat bukti yang masuk akal bahwa organisasi tersebut:

- a) telah bertahan selama jangka waktu tertentu;
- b) telah mencapai tingkat otonomi tertentu dalam menentukan programnya;

- c) diterima dan dihargai oleh kliennya, oleh masyarakat dan oleh kooperator dan pesaingnya; dan
- d) mempunyai dampak terhadap lingkungan. Di sisi lain, (Axinn, 1971) berhipotesis bahwa upaya pengembangan institusi cenderung diselingi oleh serangkaian krisis dan krisis akan selalu ada. Jadi, dari segi dimensi waktu, rata-rata semakin lama waktu antar krisis, semakin terlembagakan organisasi tersebut. Dalam hal tingkat keparahan krisis, dapat juga dikatakan bahwa semakin ringan rata-rata krisis yang terjadi, semakin terlembagakan organisasi tersebut.

Suatu organisasi telah mencapai tahap institusional ketika:

- a) organisasi telah memperoleh independensi dan otonomi yang lebih besar,
- b) menjadi teladan bagi pihak lain,
- c) nilai-nilainya ditiru oleh pihak lain,
- d) standar kinerja dan kualitas kerja menjadi standar utama. tolok ukur yang digunakan oleh orang lain, dan
- e) terdapat tingginya arus warga yang secara sukarela meminta nasihat dan bantuan darinya. Namun menurut (Jaffee, 1998), tingkat pelembagaan dapat diukur dengan seperangkat kriteria tipe ideal dari variasi pola-variabel. Kriteria tersebut adalah kekakuan-adaptasi, kompleksitas-kesederhanaan, subordinasi otonomi, dan perpecahan koherensi.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. KESIMPULAN

Menarik untuk mengkaji apakah praktik akuntan publik telah menjadi institusi sosial atau tidak. Kajian semacam ini memerlukan ujian dan keterlibatan yang ketat pihak yang terkena dampak dari jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik.

Dengan mengeksplorasi variabel-variabel yang menentukan keadaan kelembagaan praktik akuntan publik, seorang peneliti dapat memajukan pengetahuan tentang profesi akuntansi di luar fungsi teknisnya dan pencapaian tujuan organisasi dari perusahaan yang

mempraktekkan profesi tersebut. Lebih penting lagi, seseorang dapat menentukan kontribusi dan pengaruh profesi tersebut di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Secara kolektif, aktivitas dan praktik berbagai firma mencerminkan nilai-nilai dan karakter bersama dari sektor akuntan publik. Hasil penelitian apapun mengenai akuntan publik sebagai institusi sosial akan signifikan dalam meningkatkan nilai jasa profesional yang diberikan kepada individu dan organisasi. Mereka adalah sumber pengetahuan yang valid dan dasar bagi inovasi dalam profesi dan pertumbuhan organisasi masing-masing perusahaan audit. Hal ini merupakan masukan yang berarti bagi para profesional dan otoritas regulasi dalam menetapkan arah kebijakan, standar teknis, dan langkah-langkah regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghafiqi, B., & Munajat, E. (2022). Impact of artificial intelligence technology on accounting profession. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 140–159. <https://doi.org/10.20473/baki.v7i2.27934>
- Axinn, G. H. (1971). Institution building concepts. Paper presented in Institution Development Seminar, Ministry of Agriculture and Livestock, El Salvador and USAID.
- Aziz Sholeh, A., & Abdul, et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82-96.
- Chapman, C. S., Cooper, D. J., & Miller, P. B. (2009). *Accounting, organizations, and institutions* (First Edition). Oxford University Press.
- Davidson, C. N., & Goldberg, D. T. (2010). *The future of thinking: Learning institutions in a digital age*. MIT Press.
- Duncan, M. R. (1975). A programming model for analysis.
- Esman, A. H. (1975). Richard Huelsenbeck. *American Imago*, 32. The Johns Hopkins University Press.
- Harbi, S. El, & Anderson, A. R. (2010). Institutions and the shaping of different forms of entrepreneurship. *Journal of Socio-Economics*, 39(3), 436–444. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.02.011>
- Hess, B. B., Markson, E. W., & Stein, P. J. (1996). *Sociology* (Fifth Edition). Allyn and Bacon.
- Hodgson, G. M. (2013). What are institutions? *Journal of Economic Issues*, XL.
- Hunt, C. L., Quisumbing, L. R., Espiritu, S. C., Costello, M. A., & Lacar, L. Q. (1997). *Sociology in the Philippine setting*. Phoenix Publishing House.
- Jaffee, D. (1998). *Levels of socio-economic development theory* (Second Edition). Praeger Publishers.

- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek persepsi harga dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27-36.
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi tata kelola menuju Bumdes produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331–341. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1899>
- Mendoza, R. R. (2012). *Accountancy research: Theory and practice (First Edition)*. Doomedane Publishers.
- Rauf, R., & Yusri Munaf, Ms. (2015). *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia*.
- Research Headquarters, M. J. E., & Muioigan, I. *. (n.d.). *The institution building concepts, an interim appraisal*.
- Richard Edwards, J., & Walker, S. P. (2020). *The Routledge companion to accounting history (Second Edition)*.
- Rini, E. S. (2022). Perkembangan pemikiran akuntansi: Tinjauan dalam perspektif sosial historis. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 333. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.517>
- Sanada, M. (2021). Bridging competing logics: Re-reading the history of transnational standardization in accounting. <https://ssrn.com/abstract=3860537>
- Shonhadji, N. (2021). Penggunaan teori sosial dalam paradigma interpretif pada penelitian akuntansi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- Silalahi, A. D., & Maullang, M. (2023). The importance of public sector accounting in government institutions. *AFoSJ-LAS*, 3(2), 192–199. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Sintonen, M., Ylikoski, P., & Miller, K. (2003). *Realism in action (First Edition, Vol. 321)*. Kluwer Academic Publishers.
- Vander Zanden, J. W. (1996). *Sociology: The core (Fourth Edition)*. McGraw Hill.